

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Dan Analisis Data

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian Data

A) Sejarah Singkat Kota Banjarmasin

Banjarmasin berdiri sejak 489 tahun yang lalu tepatnya 24 September 1526. Terangkai dalam sejarah yang panjang, Banjarmasin dulu bernama bandarmasih yang diambil dari nama seorang patih, yaitu patih Masih yang merupakan kepala kampung Banjar yang berada dibagian utara muara sungai Kuin. Patih Masih sangat berjasa dalam mendirikan kerajaan Banjar, Dia bersama patih lainnya mengangkat pangeran Samudra menjadi raja Banjar. Secara resmi Banjarmasin berdiri pada tanggal 24 September tahun 1526 ketika kerajaan Banjar yang dipimpin pangeran Samudra memenangkan pertempuran dengan kerajaan Daha atas bantuan kerajaan Demak, pada saat itu pula pangeran Samudra memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suriansyah. Itulah masa permulaan kota Banjarmasin.

Kehidupan di Kota Banjarmasin memang tidak terpisahkan dari Sungai Barito dan beserta anak-anak sungainya. Sejak dahulu Banjarmasin memegang peranan strategis dalam lalu lintas perdagangan antar pulau, karena terletak di pertemuan antara sungai Barito dan Sungai Martapura yang Luas dan dalam. Terletak 22 km dari laut Jawa, sungai – sungai tersebut tentunya dapat dilayari kapal besar sehingga kapal-kapal Samudera dapat merapat hingga Kota Banjarmasin.

Pada zaman Belanda, Banjarmasin menjadi pelabuhan masuk dan keluar bagi seluruh daerah aliran Sungai Barito dan merupakan pelabuhan transito untuk kapal – kapal yang datang dari Singapura dan Jawa, ke pantai timur Kalimantan. Barang-barang hasil hutan seperti rotan, damar, kapur barus, karet, telur itik, buah-buahan, barang anyaman rotan, serta batu-batuan permata dan berlian. Barang yang masuk dari Jawa dan Singapura terdiri dari beras, ikan asin, barang-barang pecah belah, minyak tanah, garam, besi dan lain-lain.

Banjarmasin berada beberapa centimeter dibawah permukaan laut. Kota ini terbelah oleh aliran sungai Martapura dan berada ditepian sungai barito, juga dikelilingi oleh puluhan sungai kecil sehingga Banjarmasin juga terkenal dengan sebutan kota Seribu Sungai. Bagi warga Banjarmasin, sungai telah menjadi sahabat sejak jaman nenek moyang, Sungai tidak hanya sebagai pemenuhan air bersih tetapi juga menjadi pembentuk sistem kebudayaan dan peradaban. Banjarmasin sebagai kota sungai adalah pintu gerbang ekonomi Kalimantan, saat ini Indonesia belum memiliki satupun kota sungai. Sungai dibanjarmasin adalah sebuah anugrah yang terindah yang patut disyukuri dan dikelola dengan sebaik-baiknya.

Luas kota Banjarmasin yakni 98,46 kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 800 ribu jiwa. Wilayah kota Banjarmasin terdiri dari 5 kecamatan, yaitu kecamatan Banjarmasin Barat, kecamatan Banjarmasin Tengah, kecamatan Banjarmasin Timur, kecamatan Banjarmasin Utara dan kecamatan Banjarmasin Selatan. Setiap kecamatan memiliki keunggulan. Kecamatan Banjarmasin Selatan dipusatkan sebagai pusat pertanian dan ekonomi terpadu, kecamatan Banjarmasin Tengah difokuskan untuk zona pendidikan dan destinasi wisata, kecamatan Banjarmasin Utara adalah zona pemukiman, sedangkan kecamatan Banjarmasin Timur diperuntukan untuk pengembangan ekonomi pertanian, dan kecamatan Banjarmasin Barat zona perdagangan dan industri. Meskipun memiliki luas wilayah yang paling kecil dibandingkan kabupaten kota di Kalimantan Selatan, namun secara geografis kota Banjarmasin menempati posisi yang sangat strategis, yaitu letaknya persis ditengah-tengah kepulauan Nusantara, sehingga menjadikan kota Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin juga menjadi wilayah perhubungan dan pertemuan antara provinsi di pulau Kalimantan, serta merupakan pintu gerbang arus barang dan jasa melalui pelabuhan, sehingga Banjarmasin juga dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa.

Sebagai daerah yang multietnis, di Banjarmasin terdapat berbagai macam suku yang ada di Nusantara, diantaranya adalah suku Banjar, suku Dayak, suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, suku Madura, suku Sunda, dan masih banyak lagi

suku-suku yang ada dikota ini. Mereka berbaur membentuk panggung keragaman budaya dalam satu wadah ikatan antar suku dan agama. Dalam pagelaran seni yang menghadirkan keberagaman, kebersamaan, kerukunan yang bertekad untuk sama-sama menjaga dan memajukan kota Banjarmasin.

Banjarmasin juga ditunjang oleh sarana infrastruktur yang memadai. Sarana transportasi dikota ini juga beragam pilihan, membuat Banjarmasin tumbuh dan berkembang dengan cepat. Dari Banjarmasin menuju bandara Syamsudin Noor berjarak sekitar 25 kilometer, perlu sekitar 30 menit untuk terhubung dengan transportasi udara.

Kemajuan Banjarmasin juga terwujud dalam penyelenggaraan pemerintahan, APBD Banjarmasin terus meningkat setiap tahunnya. Berbagai penghargaan telah diraih oleh kota ini, saat ini Banjarmasin termasuk kota yang berhasil dalam pengelolaan PBB perkotaan di Indonesia. Selain itu, kota ini juga mendapatkan penghargaan ditingkat asia tenggara, sebagai kota besar dengan penataan lingkungan berkelanjutan yang berindikator pengelolaan air bersih terbaik (sumber : <https://berita.banjarmasinkota.go.id/pages/profil-kota>, diakses 21 Januari 2022)

B) Deskriptif Singkat Kota Banjarmasin

Banjarmasin adalah salah satu kota sekaligus ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarmasin merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), sebagai kota pusat pemerintahan (Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan) serta sebagai pintu gerbang nasional dan kota-kota pusat kegiatan ekonomi nasional.



Gambar 4.1: Logo Kota Banjarmasin

Kota yang terdapat di Kalimantan ini termasuk salah satu kota besar di Indonesia, walau luasnya yang terkecil di Kalimantan, yakni luasnya yang lebih kecil daripada Jakarta Barat. Kota yang dijuluki kota “seribu sungai” ini merupakan kota delta atau kota kepulauan sebab terdiri dari sedikitnya 25 buah pulau kecil (delta) yang merupakan bagian-bagian kota yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya pulau Tatas, pulau Kelayan, pulau Rantauan Keliling, pulau Insan dan lain lain. Banjarmasin juga merupakan kota penting di wilayah Kalimantan Selatan yang saat ini memiliki posisi yang strategis secara geografis.

C) Luas Wilayah Kota Banjarmasin

Luas kota Banjarmasin 72 km² 0,19% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 5 kecamatan dengan 50 kelurahan. Komposisi luas wilayah masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Tabel 4.1: Luas Wilayah Per-Kecamatan di Banjarmasin

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk
1.	Banjarmasin Utara	16,54	41.351	149.442
2.	Banjarmasin Timur	23,86	31.343	118.429
3.	Banjarmasin Barat	13,13	39.138	148.640
4.	Banjarmasin Selatan	38,27	39.570	155.505
5.	Banjarmasin Tengah	6,66	25.541	94.207
Jumlah		98,46	175.907	666.223

Sumber: www.banjarmasinkota.bps.go.id , 2022

D) Penduduk Kota Banjarmasin

Mayoritas penduduk kota Banjarmasin berasal dari etnis Banjar yang mendiami kota Banjarmasin merupakan kelompok Banjar Kuala, namun di kota Banjarmasin juga terdapat orang Banjar Pahuluan yang berasal dari Banua Anam, Serta orang Banjar dari daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan. Adapun etnis dan suku-suku lainnya yang terdapat atau bermukim di kota Banjarmasin yaitu etnis Jawa, Madura, Arab, Tionghoa, Dayak, Bugis, Sunda, dan lain-lain. Badan Pusat Statistik (BPS) kota Banjarmasin secara umum mencatat proyeksi data

kependudukan di daerah Banjarmasin pada tahun 2019 berdasarkan kecamatan, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin Berdasarkan Umur

No.	Kelompok Umur	Tahun (2019)
1.	0-4	65.595
2.	5-9	63.484
3.	10-14	56.266
4.	15-19	57.295
5.	20-24	62.201
6.	25-29	58.574
7.	30-34	57.483
8.	35-39	55.940
9.	40-44	53.726
10.	45-49	47.129
11.	50-54	38.985
12.	55-59	31.622
13.	60-64	18.657
14.	65-69	12.239
15.	70-75	6.917
16.	75+	6.680
Jumlah		692.793

Sumber: www.kalsel.bps.go.id, 2023

Adapun data kependudukan kota Banjarmasin ditinjau berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) kota Banjarmasin pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Data Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kota Banjarmasin

No.	Jenis Kelamin	Data Penduduk (2019)
1.	Laki-laki	347.005
2.	Perempuan	345.788
Jumlah		692.793

Sumber: www.kalsel.bps.go.id, 2023

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat bahwa jumlah data penduduk menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) kota Banjarmasin pada tahun 2023 dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 347.005 jiwa dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 345.788 jiwa.

E) Pemerintah Kota Banjarmasin

1) Profil Pemerintah Kota Banjarmasin

Tabel 4.4 Profil Pemerintah Kota Banjarmasin

Walikota	Ibnu Sina
Wakil Walikota	Arifin Noor
Alamat	Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70001
Telepon	(0511) 4368142

Sumber: (Diolah oleh peneliti, 2024)

2) Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjarmasin

VISI

"Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman)"

MISI

1. Mewujudkan kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera;
2. Mewujudkan kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif bagi pribadi dan kehidupan masyarakat;
3. Mewujudkan kota Banjarmasin indah dengan penataan kota berbasis tata ruang berbasis sungai guna terwujud kota yang asri dan harmoni;
4. Mewujudkan kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan

dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya banjar serta pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;

5. Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih dan profesional berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi melayani sebagai suatu tanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan YME;

Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang, serta pembangunan menyeluruh mulai dari daerah terluar, terpencil, dan terbelakang sebagai pembangunan dasar untuk menjadikan kota Banjarmasin nyaman yang ditunjang dengan perbaikan pengelolaan wisata dan pengelolaan pasar tradisional secara profesional.

E) Kecamatan Banjarmasin Barat

Kecamatan Banjarmasin Barat secara geografis berada disisi paling Barat Kota Banjarmasin yang berbatasan langsung dengan kabupaten Barito Kuala dengan garis batas terletak di Sungai Barito. Secara umum wilayah ini merupakan dataran rendah sebagian kecil berada pada bantaran daerah aliran sungai. Luas keseluruhan Kecamatan Banjarmasin Barat mencapai 13.37 km persegi.

Secara administratif, Kecamatan Banjarmasin Barat meliputi 9 kelurahan yaitu kelurahan pelambuan, kuin cerucuk, kuin selatan, belitung selatan, belitung utara, basirih, telaga biru, telawang dan teluk tiram.

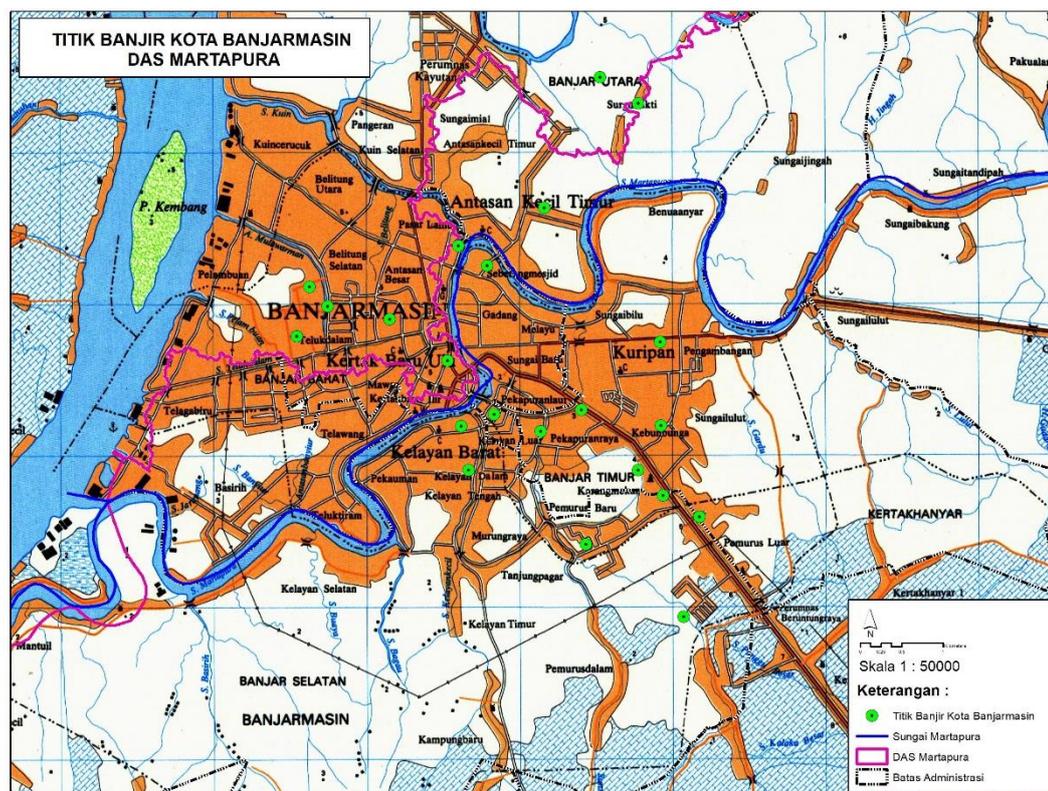
Daftar sungai yang ada di Kecamatan Banjarmasin Barat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin dari data Dinas PUPR Kota Banjarmasin,

No	Nama Nama Sungai	Panjang Sungai (m)	Lebar Sungai (m)
1.	Sungai Duyung	1004,498	40
2.	Sungai Batas Belitung Darat	1351,590	10
3.	Sungai Pelambuan	1505,227	50
4.	Sungai Bahara	731,010	25
5.	Sungai Sidmulya 1	411,027	16
6.	Sungai Sidmulya 2	335,313	6
7.	Sungai Belasung	365,431	12
8.	Sungai Antasan	584, 431	13
9.	Sungai Gg saadah	478,049	9
10.	Sungai Saka Permai	2288,600	40
11.	Sungai Anjir Mulawarman	1759,739	40
12.	Sungai Teluk Kecil	183,775	15
13.	Sungai Diangkuci	466,314	25
14.	Sungai Rawa-Rawa	408,597	18
15.	Sungai Gg Kalimantan	87,179	8
16.	Sungai Landas	756,122	25
17.	Sungai Anak Belitung	308,662	10
18.	Sungai Gg AA	280,796	5
19.	Sungai Cendrawasih	612,726	10
20.	Sungai Belitung Darat	1322,576	15
21.	Sungai Rawasari	695,773	15
22.	Sungai Jurung	334,949	15
23.	Sungai Saka Sindawa	1315,790	35
24.	Sungai Banyuur	1506,430	60
25.	Sungai Bakantan	778,143	25
26.	Sungai Baguntin	466,288	15
27.	Sungai Jaranang	303,300	8
28.	Sungai Saka Banteng	324,630	50

29.	Sungai Saka Besar	1134,126	15
30.	Sungai Yapahut	1085,523	52
31.	Sungai Gg Hikmah	413,969	8
32.	Sungai Gg Amal	204,954	5
33.	Simpang Belitung	194,747	6
34.	Simpang Anem	433,605	12
35.	Sungai Belitung Kecil	156,040	6
36.	Sungai Komp. Damai	86,974	8
37.	Sungai Gg Famili	89,115	8
38.	Sungai Anak Saka Permai	60,900	6
39.	Sungai Anak Pelambuan ka 1	669,795	80
40.	Sungai Anak Pelambuan Ki 1	681,436	70
41.	Sungai Anak Gg Sadaah	358,463	8
42.	Sunga Anak Banyuur	112,770	9
43.	Sungai Anak Saka Sindawa	2341,893	22

2. Hasil Penelitian

Wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat dengan wilayah Barat berbatasan dengan Sungai Barito, mencakup 9 Kelurahan yakni Kelurahan Telaga Biru, Pelambuan, Belitung Utara, Belitung Selatan, Kuin Cerucuk, Kuin Selatan, Basirih, Telawang, dan Teluk Tiram. Berdasarkan hasil Observasi lapangan diketahui bahwa Wilayah yang terdampak Banjir yang cukup parah pada Januari tahun 2021 antara lain: Kelurahan Kuin Selatan dan Teluk Tiram. Berikut titik-titik banjir yang ada di DAS Sungai Martapura Kota Banjarmasin.



Jika dilihat dari Kerugian Materil dan Immateriil dari wawancara dilapangan disebutkan bahwa banyak Rumah rusak ringan hingga berat. Masyarakat tidak ada pemasukan karna tidak bisa berdagang dan beraktifitas normal karena mayoritas adalah pedangan dan swasta selama kurang lebih 14 hari. Di beberapa wilayah seperti di Kelayan luar banjir yang terjadi tidak terlalu parah atau hanya pasang surut Sungai, dan permasalahan drainase yang tidak berfungsi dengan baik di beberapa RT. Ada beberapa kondisi yang terdampak cukup tinggi pada banjir kemarin, sungai yang mati juga menjadi penyebab banjir

Pihak kelurahan meyampaikan bahwa seluruh wilayah yang ada di kelurahan Gadang terdampak banjir, karena disebabkan sungai benawa dan merupakan anak sungai martapura yang berada ditengah pemukiman warga meluap.

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung dalam laporan hasil penelitian akan menguraikan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1). Identitas Informan

Nama : Soliki, ST. MT

Jabatan : Pegawai Dinas PUPR Kota Banjarmasin

Pendidikan : Megister Teknik

Tempat Wawancara : Kantor Dinas PUPR Kota Banjarmasin

2). Uraian

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan Dinas PUPR terkait Mitigasi Banjir Januari 2021 didapatkan hasil penelitian bahwa Ada warga dan masyarakat terdampak parah yang mengungsi ke rumah keluarga terutama di kawasan Banjarmasin Barat yang tidak terlalu terdampak, dan sebagian wilayah Banjarmasin Tengah seperti sebagian wilayah Kelurahan Teluk Dalam dan Sungai Laut.

Ada dapur umum yang dikoordinasikan oleh Lurah Seberang Mesjid dan Teluk dalam di Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Barat. Banjir di Kota Banjarmasin umumnya intensitas ringan dan sedang, yang memperparah hanyalah kondisi pasang surut dimana Pagi hari hingga Siang hari surut, sedangkan Sore hingga Malam hari air pasang hingga masuk ke dalam rumah se mata kaki.

Berdasarkan wawancara dengan pihak PUPR Kota Banjarmasin terkait dengan Bapak Soliki, ST. MT. Sebagai berikut: “Sasaran dilaksanakannya kegiatan ini adalah masyarakat didaerah rawan bencana banjir. Harapannya adalah terwujudnya kesadaran, kemampuan, dan peran serta masyarakat dalam perlindungan terhadap ancaman bencana banjir.” (Wawancara dengan Bapak Solikin 24 juli 2023)

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pengelola sungai di kecamatan banjarmasin barat kota banjarmasin terhadap upaya pengelolaan sungai semakin meningkat dari tahun ketahun bahwa upaya pengelolaan langkah yang di lakukan pemerintah dan instansi terkait sudah secara berkala tapi di titik tertentu DAS dan setiap harinya karena di banjarmasin barat membersihkan sungai yang ada di kecamatan banjarmasin barat kota banjarmasin untuk melakukan langkah terhadap

situasi darurat banjir. Hal ini menunjukkan tindakan nyata dalam penerapan Perda No 15 tahun 2016 tentang upaya pengendalian banjir dan genangan.

Mengacu dalam pengelolaan sungai pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan Sungai dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai tersebut masih berjalan hingga sekarang seperti program normalisasi sungai dan program lainnya sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan daerah tergantung situasi dan kondisi dilapangan. Proses implementasinya pun sudah jelas bahwa sebelum melakukan program-program tersebut pihak bidang Sungai dinas PUPR kota Banjarmasin melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Menyikapi permasalahan adanya bangunan ilegal yang ditemui di sungai Yang mengganggu dinas PUPR kota Banjarmasin secara tegas bahwa mereka tidak pernah memberikan rekomendasi membangun bangunan dipinggiran sungai bahkan dengan proses legal dengan peraturan yang ada pun untuk saat ini dipersulit hampir tidak juga memberikan rekomendasi membangun bangunan dipinggiran sungai atas surat izin dari dinas Perizinan.

Perlu diketahui bahwa pemotongan bangunan ilegal tersebut tidak ada sistem pembebasan lahan/ganti rugi karena tidak di atur dalam peraturan daerah terkait, akan tetapi terkait hal tersebut dalam praktiknya pelaksana kebijakan memberikan ongkos bongkar bangunan dengan alasan kemanusiaan yang mana hal tersebut tidak diatur di dalam peraturan daerah. Benturan kepentingan tersebut terjadi karena Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ingin mempertahankan perumahan disekitar bantaran sungai karena termasuk dalam program penataan dinas, sedangkan bidang sungai dinas PUPR kota Banjarmasin.

Terkait implementasi kebijakan Perda 15 tahun 2016 terkait pengendalian banjir. Maka Stakeholder Perlu memperhatikan kapasitas drainase ketika melakukan pembangunan jalan, agar air tetap bisa mengalir ke sungai dan tidak menyebabkan banjir. Selain itu Perlunya revitalisasi anak-anak sungai yang mati dikarenakan banyaknya kondisi drainase (gorong-gorong) yang tidak berfungsi dengan normal. Beberapa kendala normalisasi adalah banyaknya bangunan yang berdiri di bantaran sungai dan adanya penurunan kontur tanah yang menyebabkan

jalan tidak rata, sehingga beberapa jalan yang lebih rendah sering tergenang banjir ketika banjir Rob.

b. Informan 2

1). Identitas Informan

Nama : Bapak Muhammad Hary

Jabatan : Anggota BPBD Propinsi Kalimantan Selatan

Pendidikan : Strata1 (S1)

Tempat Wawancara : Sekertariat BPBD Propinsi Kalimantan Selatan

2). Uraian

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan salah satu Anggota BPBD Provinsi Kalimantan Selatan terkait penanganan Banjir, Bapak Muhammad, disebut bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin perlu Meminta Pemerintah Provinsi agar mengeluarkan peraturan mengenai izin mendirikan bangunan di bantaran sungai. “Menurut saya semua kegiatan yang dijalankan ini sangat penting, karena semua kegiatan memiliki hubungan atau kolerasi dari semua kegiatan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir.” (Wawancara dengan Bapak Muhammad, BPBD Kalsel 24 juli 2023). Hal ini mengantisipasi aspek hukum dan peraturan yang terimplementasi agar tidak terjadinya pendangkalan di beberapa anak sungai pada daerah Sungai Pekapuran. Meminta bantuan aparat kelurahan dan kecamatan untuk mensosialisasikan dan edukasi tentang bahayanya membuat bangunan di daerah bantaran sungai. Dari Pemerintah bersinergi untuk mencari solusi tentang permasalahan banjir di Kota Banjarmasin sesuai prioritas. Harapan semoga pengendalian banjir akan dilaksanakan dalam waktu secepatnya.

c. Informan 1

1). Identitas Informan

Nama : Soliki, ST. MT

Jabatan : Pegawai Dinas PUPR Kota Banjarmasin

Pendidikan : Megister Teknik

Tempat Wawancara : Kantor Dinas PUPR Kota Banjarmasin

2). Uraian

Berdasarkan data historis dan wawancara terstruktur pada narasumber kunci, dan penelusuran dari peta dan foto lama dapat disimpulkan bahwa eksistensi bermukim yang masih ditemui secara utuh pada masyarakat di Banjarmasin yaitu adanya ketergantungan dan keterikatan akan fungsi sungai hanya pada fase awal terbentuknya permukiman hingga akhir tahun 70-an. Perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran orientasi bermukim yang mempengaruhi eksistensi bermukim di tepi sungai. Bentuk eksistensi yang mengalami adaptasi dan perubahan namun masih dapat ditemui ciri/ karakteristik yang menandainya. Adanya aktivitas bermukim, mengakibatkan kondisi fisik ruang sepanjang tepian sungai di kawasan ini dalam perkembangannya terus mengalami penurunan eksistensi bermukim, berupa: 1) Padatnya permukiman penduduk, dimana hampir tidak ada jarak yang memisahkan antar rumah (bangunan) selain itu permukiman penduduk berbaur dengan industri pengolahan kayu milik masyarakat yang ada di tepian sungai. 2) Pertumbuhan massa bangunan yang terus terkonsentrasi di sepanjang tepian sungai menyebabkan area tersebut semakin padat. 3) Perkembangan aktivitas masyarakat di sungai mulai berorientasi ke darat karena adanya jaringan jalan darat yang semakin baik. 4) Ruang untuk bersosialisasi di sepanjang tepian sungai seperti lapangan olahraga, taman bermain ataupun area parkir yang semakin terbatas.

Untuk relokasi nanti akan dikoordinasikan, Dinas PUPR dari hasil wawancara Bapak Solikin juga menyebutkan sebagai berikut: “Karena kami masih kekurangan Sumber Daya, maka dari itu kami menghimbau Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana banjir seperti daerah dataran rendah, serta satuan kerja terkait, yang ikut ambil andil dalam penanggulangan bencana. Harapannya adalah masyarakat akan semakin sadar, akan perlindungan terhadap ancaman bencana banjir yang juga didukung oleh mantapnya satuan perlindungan masyarakat dan manajemen penanggulangan bencana.” (Wawancara dengan Bapak Solikin 25 juli 2023). Dari hasil wawancara disebutkan bahwa Pemerintah Kota meminta sinergi antara lurah dan camat untuk mensosialisasikan agar tidak tinggal kembali ke sungai. Masalah utama tentang pembebasan lahan terkhusus

daerah Sutoyo, untuk itu Langkah pertama konsultan akan mendesain terlebih dahulu kemudian berkoordinasi dengan beberapa lurah kecamatan untuk menganalisa kembali. Untuk fungsi pintu air buka tutup di Sungai Belasung akan dikaji ulang kembali berdasarkan fungsinya. Penempatan sungai Sutoyo di tengah untuk menghindari sungai berbatasan langsung dengan rumah warga, agar meminimalisir adanya jembatan yang dibangun masyarakat secara sepihak dan mengganggu aliran sungai.

d. Informan 3

1). Identitas Informan

Nama : M. Anta

Jabatan : Sekretaris Camat Kecamatan Banjarmasin Barat

Pendidikan : Strata 1 (S1)

Tempat Wawancara : Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat

2). Uraian

Untuk perencanaan utama baru di Soetoyo, untuk Sungai Belasung kemungkinan akan menyusul menyesuaikan kewenangan Sungai Belasung sebagaimana disebutkan oleh Sekretaris Camat Kecamatan Banjarmasin Barat yakni Bapak Anta:“Hambatan dan kendala yang kami alami itu adalah dana , sarana dan prasarana yang terbatas, serta kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu perubahan personel yang begitu cepat di dalam sistem kerja pemerintah, sehingga perlunya penyesuaian kerja kembali apabila terjadi perubahan personel atau bidang kerja. Selain itu anggaran yang bisa dikatakan kurang. (Wawancara dengan bapak Anta 25 juli 2023)

Maka dari itu perlunya integrasi agar dipegang Pemkot atau Provinsi dan perlu adanya koordinasi yang lebih intens untuk kemaslahatan masyarakat. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan provinsi, diharapkan dapat tercipta solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi berbagai masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dapat terus meningkat.

e. Informan 4

1). Identitas Informan

Nama : Hizbullwdbthoni

Jabatan : Kepala Bidang Sungai PUPR Kota Banjarmasin

Pendidikan : Magister

Tempat Wawancara : Kantor PUPR Kota Banjarmasin

2). Uraian

Dari hasil wawancara dilapangan terkait implementasi Perda 16 tahun 2016 jika terkait mitigasi banjir yang terjadi tahun 2021 silam, masyarakat menginginkan perumahan bantaran sungai tersebut dihilangkan saja karena bantaran sungai adalah ruang terbuka hijau yang tidak boleh ada perumahan sesuai dengan peraturan yang ada. Permasalahan diatas kemudian dilakukan mediasi hingga hingga sampai pada kesimpulan bahwa perumahan pemukimannya seperti rumah uno yang memiliki nilai sejarah dan kawasan perumahan sungai jingah sebagai kawasan religi yang kemudian dipertahankan. Dari permasalahan ini maka dapat dilihat bagaimana kinerja para pelaksana kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang ada walaupun tetap saja tidak bisa menutup mata atas benturan yang terjadi dikarenakan berbeda pandangan dalam pengimplementasian pengelolaan sungai.

Tantangan yang akan dihadapi yaitu pada DAS Aliran Sungai Martapura yang berimbas akan pada pasangnyanya air sungai yang kerap terjadi karena elevasi Kota Banjarmasin yang rendah kurang lebih 6-16cm diatas permukaan laut. Sungai yang diadakan transportasi sungai dan lokasi mana saja yang masih menjadikan perahu untuk transportasi sungai karena akan diadakannya pintu air apakah mengganggu kegiatan tersebut seperti halnya disebutkan oleh narasumber lapangan: Sebenarnya anggaran dana dan sarana masih bisa dibilang belum cukup memadai, tapi setidaknya anggaran dan sarana tersebut sudah cukup mendukung kegiatan yang dilakukan BPBD. Untuk masalah finansial dan sarana pelaksana kegiatan, jujur kami masih memperoleh bantuan dari pemerintah pusat (BNPB) dan pemerintah daerah (APBD).” (Wawancara dengan bapak Hizbullwdbthoni 25 Juli 2023). Perlunya penanganan mengenai sampah rumah tangga dan sampah

yang berasal dari hutan dari Hulu ke Hilir Banyaknya bangunan-bangunan berdiri yang menghalangi aliran air sungai terkhusus seluruh Kota Banjarmasin kepada pemerintah daerah dan stakeholder terkait agar menerapkan peraturan yang lebih tegas dan terimplementasi kepada masyarakat. Berkaitan dengan Banjir ROB dalamnya sungai tidak akan berpengaruh, untuk itu konsep penanganan ROB akan lebih mengarah ke pasca banjir. Seperti berkurangnya waktu genangan air dari beberapa minggu menjadi beberapa hari atau jam saja. Untuk normalisasi sungai karena keterbatasan dana, untuk itu prioritas utama lebih ke sungai yang ada di hilir.

Terkait aspek Disposisi perlunya sinergitas antara Pemerintah Kota, Provinsi, Stakeholder terkait seperti Balai Wilayah Sungai III yang bertempat di sependan sungai Sutoyo.S Banjarmasin Barat. Perlu adanya informasi yang jelas mengenai pelaksanaan kelapangan, baik dari segi sosialisasi, waktu pelaksanaan, dan dalam jangka waktu berapa untuk menyelesaikan pengendalian banjir ini. Segala perencanaan harapannya dipercepat untuk mengantisipasi kembali agar tidak terjadi banjir yang cukup parah. Selain itu pemerintah kota juga mengharapkan kegiatan seperti ini akan dilanjutkan terkhusus mengenai eksekusi ke lapangan.

Untuk teknis dan mekanisme menjalankan peraturan Sempadan Sungai akan mengikuti peraturan Provinsi dan Kota dan Balai Wilayah Sungai sebagai bentuk pengawas sungai. Seperti halnya yang disebut oleh salah satu narasumber yang ada di Dinas PUPR: Cara kami mengidentifikasi respon publik adalah dengan mengadakan peninjauan ulang ke daerah-daerah yang diundang dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan banjir tersebut. Kami akan menanyakan kepada masyarakat di daerah tersebut apakah pesan penanggulangan tersebut telah sampai ke mereka atau belum. Setelah mengadakan suatu kegiatan sosialisasi, biasanya kami mengadakan peninjauan ulang ke daerah-daerah yang kami undang tersebut, apakah pesan yang dimaksud telah sampai, atau belum. Biasanya kami mengadakan peninjauan ulang ke daerah-daerah yang diundang dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan banjir tersebut.” (Wawancara dengan Bapak Hizbullwdbthoni 25 juli 2023).

Selain terdapat proses kesinambungan, terdapat juga perubahan pada fisik permukiman dan hunian (tipologi, fungsi, orientasi, material dan konstruksi) serta faktor yang mempengaruhinya (antara lain faktor hukum, ekonomi, sosial, kekerabatan, pengetahuan, kesadaran, dan ketergantungan terhadap sungai). Pola hunian mengikuti bentuk sungai, akses dan orientasi bangunan mengutamakan sungai sebagai area depan. Hal ini disebabkan Adanya jembatan, jembatan ringkap, dermaga, batang, jamban dan titian sebagai bagian elemen arsitektur sungai. Elemen-elemen ini selain berfungsi sebagai penunjang aktivitas berbasis sungai juga berfungsi sebagai konektivitas antara sungai dan darat. Transportasi sungai dan budaya kehidupan sungai menjadi gambaran keseharian masyarakatnya. Jika dilihat dari Aspek non fisik dilihat dari besarnya kesadaran, pengetahuan, dan ketergantungan akan fungsi dan peran sungai. Besarnya kesadaran menjaga dan memelihara lingkungan sungai, pengetahuan membangun dan berhuni pada lingkungan sungai dan rawa. Besarnya ketergantungan terhadap fungsi dan peran sungai dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi dan peran tersebut antara lain sebagai fungsi ekonomi, sosial dan budaya (penunjang transportasi, penunjang mata pencaharian, sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain). Posisi sungai dan jalan sebagai elemen yang dominan adalah ketika adanya koeksistensi sungai dan jalan dalam elemen-elemen permukiman maupun aktivitas masyarakatnya.

Dari Pemerintah bersinergi untuk mencari solusi tentang permasalahan banjir di Kota Banjarmasin sesuai prioritas. Harapan yang diinginkan oleh masyarakat semoga pengendalian banjir di seluruh Kota Banjarmasin meliputi DAS Martapura, Aliran Sungai Zafry Zam-Zam, Sungai Sutoyo, Sungai Veteran dan Sungai Pekapuran akan dilaksanakan dalam waktu secepatnya. Meminta bantuan aparat dari Koramil, Kepolisian, kelurahan dan kecamatan untuk mensosialisasikan dan edukasi tentang bahayanya membuat bangunan di daerah bantaran sungai. Perlu ditinjau ulang apabila diperlukan adanya rekolasi bangunan pengadaan lahan pada pengendalian banjir. Peninjauan Kembali normalisasi dan pengerukan pada beberapa aliran sungai. Selain normalisasi, perlu diperhatikan mengenai penataan sampung kanan dan kiri sungai.

Dari aspek diatas maka perlunya penyederhanaan hukum dan kepastian yang diterima masyarakat luas agar implementasi Perda 15 tahun 2016 terkait pengendalian banjir ini bisa dilaksanakan sesuai dengan aspek hukum, sosial dan humaniora yang terkandung didalamnya, terkhusus yang ada di Kota Banjarmasin, dan Kecamatan Banjarmasin Barat.

B. Pembahasan Penelitian

Kewenangan Pemerintah Kota dalam hal penyelenggaraan alur sungai masih belum optimal, Kelas Alur sungai masih belum tersedia, Sungai yang di manfaatkan masyarakat Kota Banjarmasin sehari – hari hingga Pengawasan alur sungai juga belum optimal. Batasan DAS Barito secara wilayah pengelolaannya mulai dari Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam hal pengelolaan sungai sebagai alur pelayaran, tugas dan kewenangan pengawasan alur pelayaran sungai, kelas alur pelayaran untuk DAS Barito dan DAS Martapura yang masuk wilayah Kota Banjarmasin sampai pemanfaatan alur sungai untuk kegiatan seperti tambat kapal, tempat makan, docking, keramba. Masyarakat yang tinggal diderah rawan bencana banjir seperti daerah dataran rendah, serta satuan kerja terkait, yang ikut ambil andil dalam penanggulangan bencana. Harapannya adalah masyarakat akan semakin sadar, akan perlindungan terhadap ancaman bencana banjir yang juga didukung oleh mantapnya satuan perlindungan masyarakat dan manajemen penanggulangan bencana.

Penelitian hukum mencari kebenaran yang koherensi, yaitu apakah norma berupa perintah dan larangan sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang didasarkan pada kepastian hukum. Suatu penelitian hukum dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan hukum yang muncul. Hasil yang dicapai adalah untuk menjawab suatu masalah hukum³⁸. Pada saat mengimplementasikan sebuah kebijakan ada banyak yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan sebuah dalam penerapan kebijakan. Termasuk kebijakan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin. Pada saat penerapan kebijakan di Kota Banjarmasin yaitu Budaya Masyarakat yang Terbiasa Tinggal di Tepian Sungai Budaya

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana,2014) hal 47

masyarakat yang terbiasa tinggal di tepian sungai ini tidaklepas dari yang namanya budaya sungai, hal itu dikarenakan merupakan kota seribu sungai dan karakteristik tanah di banjarmasin adalah cenderung datar.

Kota Banjarmasin jenisnya tanah rawa, maka dari itu Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi dari Pemerintah Kota Banjarmasin yang harus ditingkatkan adalah berupa workshop mengenai tata cara penanggulangan bencana banjir, pelatihan atau simulasi kesiapsiagaan, dan ajakan ke masyarakat untuk menjaga lingkungannya. Pemerintah Kota Banjarmasin telah melaksanakan mitigasi bencana diantaranya Didalam sosialisasi penanggulangan bencana banjir ini, kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan, pemberian informasi tentang tata cara menanggulangi bencana banjir, serta kiat-kiat yang bila dilakukan apabila menghadapi bencana banjir. Pemerintah Kota Banjarmasin juga bisa bekerjasama dengan Tagana Provinsi Kalimantan Selatan yang berdiri bersamaan dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan yang berkantor di Kecamatan Banjarmasin Barat. Selain itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga siap siaga untuk mengendalikan banjir. Segmentasi atau sasaran BPBD yang paling mendasar adalah masyarakat, khususnya masyarakat yang berada didaerah rawan bencana banjir, selain itu ialah pihak/ lembaga/ aparatur lain yang juga bertanggung jawab dengan penanggulangan bencana banjir.

Harapannya ialah terwujudnya kesadaran, dan peran serta masyarakat dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut. Serta terciptanya koordinasi yang baik dan sepaham dengan pihak/ instansi terkait sehingga penanggulangan bencana banjir dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. BPBD memiliki segmentasi khusus dalam melakukan sosialisasi seperti bencana banjir, BPBD mengundang sejumlah masyarakat yang berada di daerah yang wilayahnya sering terkena banjir, seperti masyarakat di daerah rendah. Pemukiman sungai sudah lama ada masyarakat pinggiran sungai rata-rata mereka yang tinggal dipinggiran sungai tanah yang mereka miliki ialah tanah warisan dari kakek atau orangtuanya. Selain mereka tinggal dipinggiran sungai mereka juga melakukan aktivitas perekonomian seperti mencari nafkah, transportasi dan aktivitas pribadi seperti mandi, mencuci dan buang air besar. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh

masyarakat pinggiran sungai ini akan berdampak pada keberlangsungan sungai di Banjarmasin dan menimbulkan masalah-masalah seperti sampah dan pendangkalan sungai.

Kegiatan eksekusi langsung dilapangan yakni pembersihan sungai, pembersihan sungai yang dimaksud disini adalah pembersihan khusus pada sampah-sampah di sungai yang terlihat secara langsung seperti plastik, kayu, tanaman hama air dll yang timbul atau mengapung ke permukaan, sementara itu koordinasi masalah kebersihan secara besar-besaran seperti pengerukan sampah atau lumpur yang ada di sungai adalah tugas bidang sungai dinas PUPR kota Banjarmasin. Hambatan dalam pengelolaan sungai tentang persampahan atau limbah rumah tangga yang hingga saat ini tidak bisa dicegah adalah perilaku sebagian oknum masyarakat yang membuang sampah atau limbah rumah tangga sembarangan ke sungai ketika ada kesempatan untuk melanggar. Penerapannya dapat menciptakan hasil yang lebih adil dan seringkali lebih baik dan dapat diterima dalam mencerminkan tujuan pengaturan hukum tersebut. Kemudian dalam putusan harus sesuai dengan asas kepastian hukum yang mana dalam pertimbangannya menerapkan suatu sanksi pidana harus memperhatikan suatu ketentuan undang-undang maupun hukum internasionalnya dengan memperhatikan fakta hukum dan asas hukum terkait. Sebagai aspek perjanjian hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum yang khusus mengatur hal-hal yang belum diatur dalam KUHAP. Namun tujuan yang hendak dicapai bersama dalam setiap peradilan pidana adalah penanggulangan kejahatan.

Setiap tahunnya juga dilakukan sosialisasi disetiap tahun di Kecamatan Banjarmasin Barat , dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan ketua RT, untuk narasumber biasanya dari pemerhati lingkungan atau komunitas-komunitas peduli sungai, diharapkan bisa memberikan motivasi kepada masyarakat untuk memelihara sungai. Di setiap kelurahan terdapat pemangku sungai, bertugas untuk menjaga serta melestariakan sungai di kawasanya masing-masing dan sebagai pihak pertama yang melaporkan kepada Bidang Sungai jika ada masalah terkait sungai, dikarenakan untuk pengontrolan sungaisungai kecil di kampung-kampung masih belum sampai kesana, ataupun berinisiatif supaya masyarakat melakukan

pembenahan terhadap sungai. Hal ini menyebabkan sungai mengalami penurunan kualitas sungai walaupun alam juga terkadang berkontribusi dalam pengurangan kualitas sungai seperti pohon yang roboh ke sungai secara langsung dan tanaman hama air yang tumbuh secara liar.

Pengelolaan sungai yang dilaksanakan oleh Bidang Sungai telah sesuai dengan Perda No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin, Bidang Sungai ini juga menjadikan semua peraturan yang terkait tentang sungai sebagai acuan termasuk Perda tersebut. Pelaksanaan Pasal 4 angka 1 Perda No. 15 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pengelolaan terhadap sungai yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mencakup 4 (empat) kegiatan yaitu perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan, dinyatakan bahwa untuk perencanaan sudah 32 dilaksanakan, untuk pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan merupakan satu-kesatuan yang pasti juga sudah dilaksanakan setelah dilakukannya perencanaan. Setiap tahunnya ada perencanaan sekaligus pengembangannya, misalnya sungaisungai mana yang perlu dibenahi, sungai-sungai mana yang perlu dihidupkan kembali, atau mencari sungai-sungai yang belum ditemukan, agar dapat didata Bidang sungai ini mempunyai program yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup yaitu program pengurangan polusi air sungai, setiap bulannya dilakukan pengukuran kualitas air sungai secara berkala, termasuk juga upaya-upaya untuk mengganti jamban-jamban yang berada disepanjang sungai dan telah diresmikan oleh Bapak terkait penggunaan toilet komunal yang mana diharapkan setiap perumahan-perumahan yang berada di pinggir sungai bisa menggunakan metode tersebut, karena jika jamban tidak diganti maka akan langsung mencemari sungai-sungai di Banjarmasin. an diberi nama, kemudian dijaga dan dipelihara. Untuk pemeliharaan rutin dilakukan setiap hari, Bidang Sungai mempunyai UPT Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase yang tugasnya setiap hari memantau, memelihara dan melakukan pembersihan sungai dengan Pasukan Turbonya

Kendala yang mempengaruhi efektivitas dalam membentuk masyarakat yang berwawasan lingkungan, dengan tidak mengurangi keamanan dan estetika adalah kurangnya kesadaran masyarakat Banjarmasin tentang pentingnya sungai

bagi kehidupan mereka, menumbuhkan rasa kepemilikan dengan sungai dan kesadaran untuk menjaga kebersihan sungai ini sangat sulit sekali. Padahal sosialisasi terkait menjaga sungai telah dilakukan setiap tahunnya. Baliho dan spanduk-spanduk himbauan agar tidak mengotori sungai pun telah dipasang di sekitaran sungai-sungai. Tetapi hal tersebut seakan tidak berpengaruh, karena setiap harinya selalu ada saja sampah yang mengapung di atas sungai.

Terkait pembebasan lahan bangunan memerlukan biaya yang cukup besar seperti contoh kasus pembebasan lahan bangunan warga dan lain lainnya yang emang rumah di pinggir sungai harus menyediakan dana kurang lebih Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar) bisa juga lebih dari pada itu hanya untuk 20 rumah ditambah relokasi menyiapkan rumah susun.

Untuk pengendalian banjir dan genangan, masih belum berhasil, karena setiap tahunnya masih saja terjadi banjir di Banjarmasin akibat kiriman dari hulu (atas) di saat musim penghujan, sedangkan genangan masih selalu ada setiap selesai hujan, karena penyerapannya yang masih lambat. Minimnya pengetahuan masyarakat dan pemahaman mereka tentang hal ini, sehingga kesadaran untuk menjaga kelestarian sungai ini sangatlah kurang. Dukungan dan peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan pengelolaan sungai di Banjarmasin masih sangat rendah. Kendala yang mempengaruhi efektivitas terkendalinya kuantitas dan kelayakan kualitas air sungai sebagai salah satu sumber air baku Kota Banjarmasin adalah karena sungai-sungai di Banjarmasin ini merupakan yang paling hilir atau yang paling bawah, sehingga aktivitas apapun yang ada di hulu pasti akan berdampak ke sungai-sungai di Banjarmasin, sehingga kualitas air sungai di Banjarmasin selalu menurun. Ditambah lagi alih fungsi lahan yang membuat anak-anak sungai menjadi kering dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Maka dari itu perlunya kepastian hukum dari pengimplementasian Perda 15 Tahun 2016 ini agar diterapkan dikemudian hari mengantisipasi mitigasi banjir besar Januari 2021 silam agar tidak terjadi Kembali atau menurunkan risiko kerugian yang diterima masyarakat.